

# **KELUARNYA NEW ZEALAND SEBAGAI KEANGGOTAAN ANZUS 1985**

**Made Selly Dwi Suryanti**

**0921105002**

**Program Studi Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Udayana**

**E-mail : Sally.smansa@gmail.com**

Abstract

The disappointment felt by Australia and New Zealand to the United of Kingdom to make the two countries that really have to have a good relationship has chosen to be in the American defense umbrella to form alliances and to approach a covenant Trilateral security cooperation called ANZUS in 1951. However, because the New Zealand Prime Minister David Lange that is derived from the labor party has anti-nuclear policy should he realized in his country. This causes a slight disturbance in the alliance, where there is disagreement between the United State and New Zealand warship linked to by Americans who want to put into the area of New Zealand. This problem led to New Zealand should remain at its founding to keep running the anti-nuclear policy and decided to get out of the ANZUS alliance.

*Key Words : New Zealand, United State, Warship, ANZUS.*

## **1. Pendahuluan**

Berakhirnya perang dunia ke II bukan berarti tidak akan terjadi perang susulan kembali, namun yang terjadi saat perang dunia II usai adalah dengan adanya kemunculan perang yang semakin besar yakni perang dingin. Dimana perang dingin ini terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang dingin terjadi karena perbedaan ideologi yang dimiliki kedua Negara berkekuatan besar tersebut yakni Amerika Serikat dengan paham liberalis sedangkan Uni Soviet dengan paham komunis.

Perang dingin kian lama kian memanas ketika mulai muncul kecurigaan kedua Negara satu sama lain, karena kedua Negara tersebut berusaha untuk membuat pengaruh ke Negara lain. Semula perang ini hanya merambah ke bagian eropa saja dan Negara-negara yang kecil katakanlah sudah ikut terpecah dan masuk ke salah satu Negara yang berseteru. Arus perang dingin yang telah merambat ke Eropa kemudian semakin meluas kembali ditandai dengan merambatnya ke wilayah Asia. Saat itulah mulai di khawatirkan akan masuk ke wilayah Pasifik Selatan yakni Australia dan New Zealand (Bhakti TT : 1-2).

Ketika Amerika serikat menjadi negara *super power* setelah perang dingin, ketertarikan Negara lain untuk bisa bergabung atau beraliansi dengan Amerika cukup banyak. Mulai dari Jepang dengan membentuk *band wagoning*. Sebagian besar negara yang ingin menjalin kerja sama dengan Amerika itu adalah karena adanya faktor kepentingan nasional yang lebih menekankan kepada sistem pertahanan Negara mereka, untuk dapat berlindung dari ancaman Negara lain. begitu pula yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan. Dimana Australia dan New Zealand ikut bergabung dengan Amerika guna menjadikan Amerika sebagai payung pertahanan Australia dan New Zealand. Ini dimulai ketika kekecewaan yang dirasakan oleh Australia terhadap Inggris yang pada saat itu Inggris tidak memperhatikan kawasan Pasifik Selatan. Akhirnya pada saat berakhirnya Perang Dunia ke II Australia bersama dengan New Zealand masuk kedalam payung pertahanan Amerika Serikat melalui perjanjian ANZUS (Darmawan ... : 1). Namun, seiring dengan berjalannya perjanjian ini, New Zealand sebagai Negara yang memiliki pengaruh cukup besar dalam tatanan dunia internasional memiliki

perbedaan pandangan dengan Amerika Serikat sehingga New Zealand mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk keluar dari keanggotaan ANZUS.

Dengan latar belakang diatas, penulis mengambil judul : Keluarnya New Zealand Sebagai Keanggotaan ANZUS Treaty pada tahun 1985. Berdasarkan judul di atas, pertanyaan yang akan penulis angkat adalah “*Mengapa New Zealand memilih jalan untuk keluar dari keanggotaan ANZUS Treaty ?*”. Dalam paper ini, penulis akan membahas isi paper dengan menggunakan perspektif realis dibarengi konsep kepentingan nasional dan pertahanan. Sedangkan metode yang kami gunakan ialah metode studi kepustakaan dan literatur.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk membantu memberikan informasi kepada pembaca mengenai penyebab dari keluarnya New Zealand sebagai anggota ANZUS Treaty dan untuk menambah referensi para pembaca yang memungkinkan memerlukan bahan bacaan tambahan sebagai studi literatur dalam menulis artikel ilmiah.

## **3. Kerangka Konsep**

### **3.1 Kepentingan Nasional.**

Kepentingan nasional merupakan hal yang berhubungan dengan power suatu Negara. Negara biasanya akan menggunakan powernya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pandangan seperti ini seperti yang dijelaskan oleh Morgenthau. Lebih tepatnya pemahaman seperti ini berfokus pada perspektif realisme klasik yang tokohnya ialah Morgenthau (Sudjatmiko 2008 : 12).

Morgenthau memfokuskan kepada “*men are evil*” yang berarti pada dasarnya manusia memiliki sifat yang egois, terutama dalam mencapai kepentingan diri sendirinya manusia lebih suka untuk mementingkan diri sendiri. Dan menurut Morgenthau manusia harus memiliki kekuatan untuk dapat mencapai kepentingan individunya. Jika dikaitkan dengan negara berarti negara harus memiliki pengaruh yang besar dalam artian negara harus memiliki power yang besar untuk dapat mencapai kepentingan nasional negaranya (Catatan Smt IV Pertemuan II tanggal 21/02/2011 mata kuliah Teori-Teori HI).

Selain itu Morgenthau juga menjelaskan mengenai kepentingan nasional yang dikaitkan dengan kepentingan regional. Sesuai dengan buku karangan Moehtar Mas’oed dalam konsep kepentingan nasional, dijelaskan mengenai Morgenthau yang berpandangan bahwa kepentingan nasional suatu Negara mendahului kepentingan regional. Baginya , bentuk aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan dan keamanan di mana harus ada timbal balik dari negara-negara yang membentuk aliansi. Apabila dari sebuah aliansi yang diciptakan namun didalamnya tidak dapat memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, kecil kemungkinan aliansi tersebut dapat bertahan lama (Mas’oed 1990 : 166).

Jika dikaitkan dengan New Zealand, saat New Zealand memilih untuk bergabung kedalam ikatan aliansi ANZUS, jelas pasti New Zealand memiliki kepentingan di dalamnya. Kepentingan New Zealand saat ia bergabung ke dalam payung aliansi ANZUS adalah untuk dapat melindungi diri dari ancaman Negara-negara yang tak bersahabat. Ditambah karena New Zealand melihat bahwa yang

memayung aliansi tersebut adalah Amerika, sehingga New Zealand berpandangan bahwa dengan berada dibawah payung Amerika, maka dirinya dapat terlindungi dari segala ancaman bahaya yang akan datang. Namun, seiring dengan berjalannya aliansi ini, di dalamnya terdapat ketidaksepahaman antara New Zealand dengan Amerika, yang menjelaskan bahwa tidak adanya kesepakatan antara keinginan New Zealand dan Amerika sehingga menyebabkan New Zealand menarik diri untuk keluar dari ikatan aliansi ANZUS tersebut.

### **3.2 Konsep Pertahanan.**

Konsep pertahanan ini seperti yang dijelaskan oleh Thomas Hobbes yang merupakan salah satu tokoh realis klasik yang berasal dari Inggris. Dalam pemikirannya Hobbes lebih menekankan kepada kekuatan dominan suatu negara dalam mempertahankan sebuah keamanan. Dengan kata lain, perlu adanya kekuatan dominan untuk menjaga pertahanan negara khususnya baik di kawasan nasional, regional, ataupun internasional.

Jika dikaitkan dengan New Zealand bergabung dalam aliansi ANZUS, hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional dari New Zealand itu sendiri. Dimana New Zealand dalam politik luar negerinya juga mempertimbangkan mengenai isu sistem pertahanan keamanan nasionalnya. Sehingga perlu menjalin kerja sama dengan Negara-negara yang mungkin memiliki kesamaan kepentingan dengan Negara lain. Hal ini dijadikan kesempatan bagi New Zealand untuk dapat menjaga keamanan New Zealand. Dalam hal ini New Zealand seperti yang dijelaskan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes bahwa perlu ada Negara dominan yang dapat memayungi sebuah Negara kecil katakanlah untuk

mendapat perlindungan guna menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya. Disini New Zealand memutuskan untuk ikut bergabung dengan Amerika dan Australia dalam wadah kerja sama aliansi yakni ANZUS (Darmawan ... : 2).

Namun, dengan New Zealand memilih keluar dari keanggotaan ANZUS, ini juga dikarenakan oleh faktor keamanan negara itu sendiri. New Zealand dengan Perdana Menteriya David Lange telah mengeluarkan kebijakan anti nuklir dengan menerapkan kepada zona bebas nuklir di mana untuk setiap kapal perang yang membawa alat senjata terutama nuklir tidak diperbolehkan masuk ke wilayah New Zealand tanpa seijin pemerintahan New Zealand. Dengan kata lain, dengan diterapkannya kebijakan ini dapat dikatakan bahwa New Zealand ingin mengurangi keterlibatannya dalam perang yang memungkinkan berdampak pada pertahanan yang kemudian memiliki hubungan dengan keamanan negaranya selain itu juga New Zealand menganggap bahwa ANZUS malah menjadi ancaman kewanar negaranya karena riskan menjadi sasaran serangan nuklir. Sehingga New Zealand memilih untuk keluar dari keanggotaan ANZUS karena salah satu alasan yang telah disebutkan tadi.

### **5. Keluarnya New Zealand sebagai Anggota ANZUS.**

Hubungan antara New Zealand dengan Amerika mulai ditekankan sejak kedua negara ditambah Australia menyepakati sebuah perjanjian yang bernama ANZUS (<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35852.htm>). ANZUS yang berarti Australia-New Zealand-United State merupakan sebuah bentuk perjanjian kerja sama keamanan yang telah ditandatangani pada Tanggal 1 September 1951 di San Fransisco. Di mana perjanjian ini ditandatangani oleh ketiga negara yang

bergabung yakni Percy C.Spender dari Australia, C.A Berendson dari New Zealand dan Dean Acheson, John Foster Dulles, Alexander Willey dan John J.Sparkman dari Amerika (The ANZUS Treaty).

Tujuan dari dibentuknya ANZUS ini cenderung lebih menekankan kepada bentuk keamanan di kawasan Asia Pasifik. Selain itu perjanjian ANZUS sendiri pernah ditandatangani pada bulan November tahun 1951 sebagai bentuk jaminan keamanan atas kemungkinan munculnya lagi kekuatan Sesperti China dan bentuk-bentuk yang bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam kawasan regional yang mengantisipasi agar tidak ada terjadinya penyebaran komunis di wilayah Asia (Darmawan ... : 6-7).

Namun, pada pertengahan tahun 80an permasalahan di dalam ANZUS mulai terjadi, hal tersebut dikarenakan oleh permasalahan kunjungan kapal perang laut dari Amerika yang hendak ingin masuk ke dalam wilayah New Zealand (<http://www.cfhs.in/articles/atar.html>). Di samping itu, memang pada bulan Juli Tahun 1984 partai buruh yang berasal dari New Zealand telah memenangkan pemilu dan berkomitmen membuat kebijakan baru yakni kebijakan mengenai keamanan New Zealand yang bebas nuklir dan mencegah adanya senjata pemusnah masal lainnya yang masuk melalui kapal. Di mana setelah Partai Buruh terpilih, Lange akan berjanji untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat dengan menerapkan larangan keseluruhan kapal perang nuklir yang masuk ke dalam wilayah New Zealand. Padahal pada saat itu New Zealand tengah bergabung kedalam member ANZUS yang beranggotakan Amerika dan Australia.

Sebelumnya dengan pembentukan ANZUS ini, ketiga member negara anggota telah berkomitmen untuk bisa berkonsultasi bersama, mengembangkan kapasitas individu dan kolektif untuk dapat saling bekerjasama dalam menghadapi bahaya ancaman yang datang dari luar serta menghadapinya bersama, seperti yang tertuang dalam artikel ANZUS Treaty. Karena bagi New Zealand, ANZUS dapat memberikan perlindungan keamanan di mana perlindungan dari Inggris Raya sudah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan ketika tensi timur dan barat mulai memanas sehingga memaksa Inggris untuk menarik mundur dirinya dari *East of Suez*, yang pada akhirnya membuat masyarakat New Zealand lebih condong memilih ANZUS dan mulai tahun 1975 mulai mengangkat ANZUS sebagai dasar dari kebijakan pertahanan kolektif (Catalinac 2010 : 317). Saat itu New Zealand telah menunjukkan kesediannya untuk mengemban tanggung jawab dari pertahanan kolektif tersebut, dengan menunjukkan kepatuhannya sebagai bagian dari negara anggota dengan mengirimkan pasukan bersenjata untuk mendukung usaha dari Amerika di Korea dan Vietnam.

Namun, apabila di implemetasikan terhadap kebijakan dari partai buruh itu sendiri yakni kebijakan bebas nuklir di mana saat itu yang menjadi Perdana Menteri baru yakni David Lange, berarti bahwa tidak ada lagi tersedia bagi kapal perang Amerika yang memuat nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya. Atau bahwa kapal perang angkatan laut Amerika tersebut hanya bisa berlabuh di wilayah New Zealand hanya jika diperbolehkan oleh pemerintahan New Zealand itu sendiri dengan jaminan bahwa kapal perang tersebut adalah kapal bebas nuklir (<http://www.cfhs.in/articles/atar.html>).



Melihat hal tersebut berarti bahwa hal ini bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh kapal laut Amerika yang memiliki kebijakan untuk menerima atau menolak kehadiran kapal nuklir tersebut. Saat itu salah seorang Sekretaris negara dari Amerika bernama George Shultz mendatangi New Zealand dari pertemuan ANZUS di Australia, kemudian mengadakan pertemuan dengan David Lange untuk membicarakan isu kebijakan anti nuklir tersebut. Meskipun demikian, belum ada keputusan yang pasti antara kedua belah pihak tersebut, namun pada intinya permohonan untuk memberikan kebijakan kapal perang Amerika yang anti nuklir tersebut masih memungkinkan untuk di negosiasikan (Catalinac 2010 : 318).

Shultz menganggap bahwa apa yang dibutuhkan dari Lange yakni mengenai janji dari partai buruh tentang kebijakan anti nuklir, adalah hanya untuk memuaskan masyarakat New Zealand mengenai janji yang diucapkan Lange pada saat pemilu. Mendengar hal tersebut, Lange langsung memutuskan bahwa harus ada izin resmi dari Amerika mengenai masuknya kapal perang Amerika ke wilayah New Zealand. Hingga pada tahun 1985, pemerintahan Amerika dengan resmi meminta izin terhadap kunjungan kapal Perang USS Buchanam yang dipilih oleh Amerika yang menurut Amerika kapal tersebut memang tidak berisi nuklir namun yang saat itu menghadiri ialah wakil dari Perdana Menteri yakni Geoffrey Palmer dan mengatakan bahwa kapal tersebut memang tidak memungkinkan membawa nuklir, namun masih memungkinkan untuk bisa menampung Nuklir atau senjata pemusnah missal lainnya. Melihat kejadian tersebut membuat hubungan antara Amerika dan New Zealand kurang baik (<http://www.cfhs.in/articles/atar.html>), sampai akhirnya memaksakan Amerika untuk

memberikan dua pilihan kebijakan Amerika terhadap New Zealand. Yakni yang pertama menerima kebijakan mengenai penerimaan kapal perang Amerika untuk dapat masuk tanpa ada informasi yang jelas maksudnya disini adalah tanpa ada perijinan resmi dari New Zealand, dan pilihan yang kedua ialah tidak menerima kebijakan tersebut.

Kejadian tersebut membuat New Zealand tidak memiliki pilihan lain dan pada bulan Januari 1985 kabinet mengadakan pemungutan suara mengenai pilihan kebijakan yang ditawarkan oleh Amerika tersebut. Pada bulan Februari tahun yang sama, New Zealand secara resmi menolak atas adanya kehadiran kapal perang milik Amerika dan meminta pertimbangan kepada Washington untuk mempertimbangkan kembali mengenai kehadiran kapal perang Amerika dengan menggantikan kapal tersebut menjadi kapal yang biasa saja. Akan tetapi, hal ini tetap ditolak karena Amerika hanya ingin memasuki kapal perangnya saja dan Amerika tidak ingin mengirimkan kapal perang biasa selain kapal nuklir (Catalinac 2010 : 318).

Penolakan yang dilakukan oleh New Zealand terhadap pilihan kebijakan yang ditawarkan Amerika tersebut, membuat Washington dan Amerika salah dalam menanggapi, Amerika mengira bahwa New Zealand menolak segala bentuk aliansi barat. Hal ini selanjutnya membuat senat Amerika harus mencabut produk-produk New Zealand dari pasar Amerika yang menyebabkan PM Australia tidak setuju terhadap keputusan tersebut. Tak lama kemudian, Lange diberitahukan oleh ketua komite Asia Pasifik bahwa semua bentuk aliran intelejen terhadap New Zealand akan segera diberhentikan, baik itu dari segi militer hingga sampai kepada akses dari New Zealand terhadap departemen

Amerika dibatasi (Catalinac 2010 : 318), sampai akhirnya pada bulan Juli 1985 yang seharusnya ada pertemuan ANZUS di Canberra akhirnya di batalkan oleh Australia karena mendapat tekanan yang besar dari Amerika (<http://www.cfhs.in/articles/atar.html>).

Menteri pertahanan New Zealand yakni Cespar Weinberger mengatakan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap aliansi. Namun bagi mereka (New Zealand) ini bukanlah menjadi hal yang terlalu penting, bahkan New Zealand tetap untuk membuat sebuah peraturan perundang undangan yang akan memperkuat status bebas nuklirnya secara hukum dan membutuhkan agar perdana menteri dapat menjamin secara publik status bebas nuklir dari setiap kapal perang atau kapal pengangkut nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya yang masuk ke dalam wilayah New Zealand. Sampai pada akhirnya kebijakan ini masuk ke dalam tingkat regional dan melahirkan perjanjian yang bernama perjanjian Rarotonga pada tahun 1985 yang menjamin bahwa kawasan Pasifik Selatan merupakan kawasan yang bebas Nuklir. Kemudian atas kebijaksanaan ini juga yang menyebabkan New Zealand akhirnya keluar dari anggota ANZUS pada tahun 1985 (Zulkifly 1996 : 82).

Setahun kemudian setelah New Zealand secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan ANZUS yakni pada tahun 1986, dan pada tahun yang sama pula Amerika menyudahi kewajiban keamanannya pada New Zealand pada tanggal 27 Juni 1986, selanjutnya Australia dan Amerika setelah kejadian tersebut membangun kembali hubungan kerja sama yang semula trilateral menjadi bilateral, yang akhirnya merubah nama ANZUS menjadi AUS yang menyebabkan hubungan ini semakin mendekatkan hubungan kerja sama keamanan antara

Australia itu sendiri dengan Amerika (Darmawan ... : 9). Disisi lain, New Zealand tetap pada pendiriannya untuk mengabdikan status bebas Nuklir kepada hukum dengan *Nuclear Free Zone, Disarmament and Arms Control Act* pada tahun 1987 (Catalinac 2010 : 319).

#### **4. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarnya New Zealand dari keanggotaan ANZUS treaty adalah karena New Zealand yang pada saat itu masa pemerintahan David Lange memiliki kebijakan anti nuklir yang menyebabkan seluruh kapal perang milik Amerika dilarang masuk. Selain itu juga, karena terjadi ketidakseimbangan di antara negara aliansi yang membuat New Zealand merasa tidak diuntungkan oleh Amerika, karena terjadi tumpang tindih antara negara kecil dan negara besar atau Negara yang memiliki *power* kecil (New Zealand) dan Negara yang memiliki *power* besar (Amerika). Di samping itu juga, New Zealand memiliki rasa kekesalan terhadap perilaku Amerika yang dengan gampang memasukkan kapal perang milik Amerika tanpa permisi masuk ke wilayah perairan New Zealand dengan menggunakan kedok aliansi, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam aliansi tersebut.

Hingga akhirnya New Zealand memutuskan untuk keluar dari keanggotaan ANZUS, yang membuat ketidakstabilan didalam aliansi ANZUS tersebut. Sampai saat ini New Zealand tetap menerapkan kebijakan anti nuklirnya dengan tujuan agar wilayah Pasifik Selatan bebas dari serangan nuklir. Dengan keluarnya New Zealand dari keanggotaan ANZUS, tetap tidak mengurangi hubungan baik antara

New Zealand dan Australia yang sudah lama dibangun, selain itu juga Australia dan Amerika sampai saat ini masih tetap menjalin kerjasama dengan baik walau tanpa New Zealand di dalamnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bhakti, Ikrar Nusa. (2002). *Keamanan Kawasan Pasifik Selatan*. (Ahli peneliti Utama dan Kepala Pusat Penelitian Politik – LIPI, Jakarta)

Catalinac, Amy L. (2010). *Why New Zealand Took Itself out of ANZUS : Observing “Opposition for Autonomy” in Asymmetric Alliances*. *Foreign Policy Analysis* (2010) 6. 317-338 (Harvard University)

Darmawan, Wawan. NN. *Aliansi Australia dalam ANUZ Treat 1951*. (staff pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah, UPI Bandung)

Hamid, Zulkifly. (1996). *Sistem Politik Pasifik Selatan*. Jakarta:Pustaka Jaya

Mas’oed, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional “Disiplin dan Metodologi”*. Jakarta: LP3ES

Sudjatmiko, Totok. (2008). *Analisis Kepentingan Dibalik Kegigihan Cina Untuk Menjadi Anggota MTCR*. *Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan*, Vol.5 No.1 Juni 2008 15-31 (Peneliti Bidang Pengkajian Kerdigantaraan Internasional)

#### **INTERNET :**

<http://www.cfhs.in/articles/atar.html> (Diakses pada tanggal 19 maret 2012 pada pukul : 21.49 Wita)

<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35852.htm> (Diakses pada tanggal 19 maret  
2012 pukul : 09.26 Wita)

<http://australianpolitics.com/foreign/anzus/anzus-treaty.shtml> (Diakses pada  
tanggal 20 Maret pukul : 01.37 Wita)